

MANAJEMEN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KOTA TANGERANG

Oleh:

Bela Santika¹⁾, Agus Sjafari²⁾

6661210045@untirta.ac.id¹⁾, agus.sjafari@untirta.ac.id²⁾

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Fokus Penelitian ini adalah Manajemen Bencana Banjir di Kota Tangerang yang terjadi setiap tahunnya berdampak pada kerugian harta benda dampak bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya pengawasan bangunan liar yang meningkatkan risiko bencana banjir, belum terdapat sistem peringatan dini khusus bencana banjir, terbatasnya personal Pusdalops BPBD, terbatasnya sarana prasana yang dimiliki BPBD Kota Tangerang, dan belum terlaksananya bantuan perbaikan rumah korban bencana banjir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen bencana banjir dengan menggunakan teori Ramli (2010 : 31 – 38) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa manajemen bencana yang dilakukan BPBD Kota Tangerang masih belum optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengawasan bangunan, pengelolaan sarana prasarana, pengurangan risiko bencana banjir terulang, dan peningkatan sosialisasi masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, Bencana, Banjir, dan Kota Tangerang

ABSTRACT

The focus of this research is Flood Disaster Management in Tangerang City which occurs every year with an impact on property losses and impacts on the community. In its implementation, there are still several obstacles such as the lack of supervision of illegal buildings that increase the risk of flood disasters, there is no special early warning system for flood disasters, the limited personnel of the BPBD Pusdalops, the limited infrastructure facilities owned by the Tangerang City BPBD, and the lack of assistance to repair the houses of flood victims. The purpose of this study is to find out how flood disaster management by using Ramli (2010: 31 – 38) theory with descriptive qualitative research methods. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the disaster management carried out by the Tangerang City BPBD is still not optimal. This study provides recommendations for building supervision, infrastructure management, reducing the risk of repeated flood disasters, and increasing community socialization.

Keywords : Management, Disaster, Flood, and Tangerang City

PENDAHULUAN

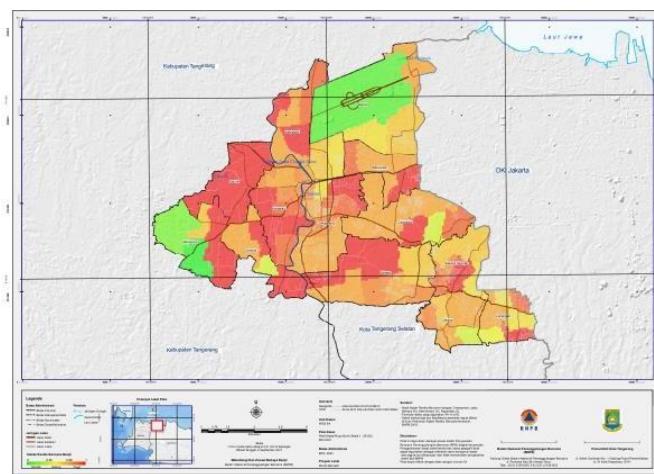
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Berdasarkan indeks risiko bencana menurut World Risk Report (2023:52) Indonesia menduduki urutan kedua dengan skor 43,5 sebagai negara dengan indeks risiko bencana tertinggi dari 193 negara. Letak geografis Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia meliputi Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia yang menjadikan Indonesia sebagai bagian dari daerah cincin api pasifik atau *ring of fire* yang menyebabkan tingginya aktivitas vulkanik dan pergerakan sesar aktif. Secara klimatologis Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Salah satu bencana yang mendominasi Indonesia salah satunya adalah bencana banjir data yang diperoleh dari BNPB bencana banjir terjadi setiap tahunnya pada tahun 2021 terdapat 1.794 kejadian, tahun 2022 dengan 1.531 kejadian, tahun 2023 dengan 1.255 kejadian, dan pada tahun 2024 bencana banjir mendominasi dengan 1.088 kejadian dibandingkan bencana lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan dengan 337 kejadian, cuaca ekstrem 455 kejadian, dan tanah longsor 135 kejadian.

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan bencana banjir yang tinggi karena kondisi topografi dataran rendah serta kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa (sebelah Utara), Samudera Hindia (sebelah Barat), dan Selat Sunda (sebelah Timur). Salah satu wilayahnya adalah Kota Tangerang yang memiliki kerawanan bencana banjir.

Kota Tangerang merupakan wilayah yang diapit oleh 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisadane, DAS Angke, dan DAS Cirarab menyebabkan daerah ini mengalami bencana banjir setiap tahunnya akibat ketidakmampuan sungai dalam menampung jumlah debit air yang tinggi terutama dari hulu pada wilayah Kabupaten Bogor.

Kota Tangerang yang memiliki kondisi topografi rendah ditambah dengan kurangnya pengelolaan drainase, resapan air, pendangkalan sungai serta kerusakan sejumlah tanggul sehingga menyebabkan luapan air pada beberapa wilayah di Kota Tangerang. Berikut disajikan peta persebaran wilayah rawan bencana banjir di Kota Tangerang:

Gambar 1 Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Tangerang



Sumber : BPBD Kota Tangerang (2024)

Peta 1.1 terdapat kecamatan dengan risiko bencana banjir tinggi terhadap bencana banjir berdasarkan kajian ditandai adanya warna merah pada setiap titiknya meliputi Kecamatan Periuk, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Larangan sehingga menunjukkan wilayah langganan bencana banjir di Kota Tangerang.

Bencana banjir yang terjadi di Kota Tangerang sejak tahun 2022 hingga 2024 mengalami keadaan yang fluktuatif. Berikut merupakan data kejadian bencana banjir yang terjadi di Kota Tangerang :

Tabel 1 Laporan Kejadian Bencana Banjir di Kota Tangerang tahun 2022-2024

Kecamatan	2022	2023	2024
Ciledug	2	1	-

Larangan	2	4	3
Karang Tengah	4	2	10
Cipondoh	4	1	6
Pinang	4	2	3
Tangerang	6	-	-
Karawaci	3	-	-
Jatiuwung	2	1	-
Cibodas	8	1	4
Periuk	11	2	1
Batu Ceper	1	-	-
Neglasari	-	-	-
Benda	3	-	9
Total	50	14	36

Sumber : BPBD Kota Tangerang (2024)

Berdasarkan tabel 1 data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang pada tahun 2022 telah terjadi bencana banjir sebanyak 50 kejadian, tahun 2023 sebanyak 14 kejadian, dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebanyak 36 kejadian terdiri dari 7 kecamatan dengan ketinggian air berkisar antara 40-150 cm dengan ketinggian air terparah berada di Kecamatan Periuk mencapai 120 cm dan Kecamatan Cipondoh mencapai 150 cm.

Kota Tangerang dalam urusan kebencanaan telah membentuk BPBD Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang No 152 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi BPBD dijelaskan bahwa, "BPBD memiliki tugas dalam membantu Wali Kota dalam urusan bencana dan kebakaran." Berdasarkan hal tersebut dalam manajemen bencana banjir BPBD Kota Tangerang melaksanakan serangkaian upaya melalui 3 tahapan pra bencana (kesiagaan, peringatan dini, mitigasi), saat bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitas, rekonstruksi).

Adapun dalam pelaksanaan manajemen bencana banjir oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang peneliti menemukan sejumlah permasalahan yang ditemukan saat observasi terkait manajemen bencana banjir sebagai berikut :

Pertama, kurangnya pengawasan BPBD Kota Tangerang terhadap bangunan liar yang memiliki potensi meningkatkan risiko bencana banjir. Berdasarkan observasi peneliti di wilayah Kecamatan Cibodas terdapat 15 bangunan liar yang dapat menyebabkan bencana banjir. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 19 terkait pengawasan yang dilakukan BPBD Kota Tangerang terhadap penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana yang dapat meningkatkan risiko bencana banjir. Hal ini karena pada aliran Kali Sabi air mengalir melalui Sungai Cisadane, adanya bangunan liar mampu menghambat kapasitas air untuk mengalir sehingga timbul potensi terjadinya luapan air.

Kedua, terbatasnya personil Pusdalops BPBD Kota Tangerang dalam memberikan data dan informasi bencana banjir. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2012 Pusdalops bertugas dalam memberikan data dan informasi kebencanaan serta dukungan kegiatan kedaruratan. Adapun peneliti menemukan kendala terkait terbatasnya personil Pusdalops BPBD Kota Tangerang memperoleh data tentang luasan lokasi bencana banjir, dampak bencana banjir, dan ketinggian air karena petugas berfokus pada penanganan sehingga menyebabkan keterlambatan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait sehingga menimbulkan risiko kerugian bahkan korban jiwa yang lebih besar.

Ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana yang digunakan saat bencana banjir. Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat sejumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir dalam kondisi rusak meliputi 2 perahu rusak, 3 mesin motor tempel rusak, 8 tenda rusak, 16 genset rusak, dan 5 pompa rusak. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana

dapat menghambat proses penanggulangan bencana banjir secara cepat kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan peneliti dalam lapangan terkait manajemen bencana banjir oleh BPBD Kota Tangerang peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses BPBD Kota Tangerang dalam manajemen bencana banjir yang rawan terjadi pada wilayah ini. Manajemen bencana dalam hal ini dilakukan melalui kegiatan dalam mengelola bencana dan situasi darurat sehingga dapat menimbalisir dampak dan kerentanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik merupakan suatu upaya yang dilakukan sekelompok orang secara bersama dalam organisasi publik untuk melakukan berbagai tugas pemerintahan melalui kebijakan publik secara efisien dan efektif. Pada administrasi publik salah satu upaya dilakukan melalui manajemen publik yang berkaitan dengan penggunaan fungsi manajemen dan sumber daya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ramlil (2010 : 11) menjelaskan manajemen bencana merupakan suatu usaha yang terorganisir dan menyeluruh dalam menanggulangi berbagai bencana yang terjadi secara cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat menurunkan kerugian maupun korban jiwa yang ditimbulkan. Terdapat beberapa berapa dimensi sebagai berikut:

1. Pra Bencana

a. Kesiagaan

Kesiagaan adalah serangkaian aktivitas dalam memberikan antisipasi bencana kepada masyarakat melalui berbagai upaya yang akurat dan praktis sehingga masyarakat mampu memiliki ketahanan saat terjadinya bencana.

b. Peringatan Dini

Peringatan dini adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi bencana kepada berbagai pihak yang daerahnya berpotensi

terkena bencana.

c. Mitigasi

Mitigasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana dengan cara melakukan kegiatan pembangunan fisik, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman bencana.

2. Saat Bencana

a. Tanggap Darurat

Tanggap darurat menurut Ramli (2010 : 31) diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan cepat untuk mengurangi pengaruh buruk akibat bencana yang terjadi.

3. Pasca Bencana

a. Rehabilitas

Rehabilitas merupakan aktivitas yang dilakukan sesudah bencana terjadi meliputi perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sehingga dapat kembali pada umumnya seperti sebelum bencana.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan upaya yang dilakukan untuk mendirikan kembali semua aspek pelayanan publik dan aktivitas masyarakat yang sempat terhenti pada wilayah pasca bencana.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidia Amalia dalam bentuk skripsi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2021 yang berjudul, "Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori menurut Ramli (2010 : 31-38) meliputi Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan belum optimalnya penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kota Cilegon

hal ini terlihat adanya permasalahan yang terjadi pada tahap pra bencana terkait kesiagaan melalui upaya pembuatan tandon yang masih dalam tahap perencanaan, belum adanya sistem peringatan dini, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana yang terjadi kemudian tahap tanggap darurat masih belum memadainya peralatan dan sumber daya manusia, dan tahap pasca bencana terkait rehabilitas akan keterbatasan pada perbaikan rumah yang rusak dan rekonstruksi yang belum dianggarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Falaq, Miftahul Rahmawaty, dan Riska Rohmatunnisa dalam bentuk jurnal jurnal Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, tahun 2021 yang berjudul, “Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Desa Niaso Muaro Jambi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori menurut Ramli (2012) meliputi Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk penanggulangan bencana banjir serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelaksanaannya belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Tangerang menggunakan metode penelitian kualitatif Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bermaksud ingin menguraikan, menjelaskan, mendekripsikan, dan menerangkan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan secara rinci terkait manajemen bencana banjir di Kota Tangerang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive yaitu penggunaan informan didasarkan pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga relevan dan sesuai dengan topik. Teknik analisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019 : 322) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai pelaksanaan “Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Tangerang” dengan menggunakan teori Rami (2010 : 31) meliputi Pra Bencana (Kesiagaan, Peringatan Dini, Mitigasi), Saat Bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca Bencana (Rehabilitas, Rekonstruksi) dengan data sesuai di lapangan sebagai berikut :

1. Pra Bencana

a. Kesiagaan

BPBD Kota Tangerang dan tim sudah cukup baik melaksanakan tahapan perencanaan pada penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontijensi Bencana Banjir sehingga terdapat perencanaan berupa persiapan petugas dan sarana prasarana peralatan penanggulangan bencana dalam pelaksanaan Apel Siaga Bencana yang diikuti oleh Tim Gabungan Penanggulangan Bencana terdiri dari BPBD, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP serta relawan dari Tagana dan PMI sebagai langkah antisipasi potensi bencana banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi saat musim hujan.

Gambar 2 Apel Siaga Bencana



Sumber : BPBD Kota Tangerang

Upaya sosialisasi dilakukan melalui Kelurahan Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana untuk pemahaman materi tentang penanggulangan bencana serta persiapan petugas/tim dari lingkup wilayah kelurahan yang rawan bencana banjir telah dibentuk sebanyak 35 Kelurahan Tangguh Bencana sehingga masyarakat memiliki kemampuan adaptasi dan kemandirian serta ikut terlibat dalam partisipasi, dan saat terjadi bencana banjir penanganan dapat dilakukan secara cepat.

b. Peringatan Dini

BPBD Kota Tangerang memiliki sistem peringatan dini yang berbasis *Early Warning System* terdapat upaya peringatan dini yang dilakukan melalui pemantauan prakiraan cuaca dari BMKG dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Instagram serta pemantauan Pos Duga Tinggi Muka Air (TMA) pada 19 titik lokasi yang dapat diakses melalui Aplikasi Sipantau namun memiliki keterbatasan pada sensor penerimaan informasi ketinggian air. Saat terdapat potensi terjadinya bencana banjir BPBD Kota Tangerang melakukan pemantauan dan monitoring titik-titik rawan bencana banjir untuk melihat kondisi dan dampak yang ditimbulkan setelah hujan deras sehingga dapat memberikan informasi dan koordinasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait kemungkinan bencana banjir sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri.

c. Mitigasi

BPBD Kota Tangerang dan tim melalui edukasi kebencanaan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat terkait cara-cara penyelamatan saat terjadi bencana dan alat-alat kebencanaan di lingkungan RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan serta anak-anak peserta didik TK, SD, SMP, dan SMA dengan prosedur penyuratan dan permohonan masyarakat untuk edukasi. Pembangunan fisik untuk mengurangi risiko bencana banjir dilakukan dengan

pembangunan tanggul, penyedotan pompa air, dan pembuatan kolam retensi namun belum sepenuhnya efektif masih belum dimilikinya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pada ancaman bencana dengan membuang sampah di sungai serta bangunan liar yang mengganggu pelaksanaan mitigasi bencana banjir maupun keterbatasan pada anggaran yang dimiliki.

2. Saat Bencana

a. Tanggap Darurat

BPBD bertugas sebagai komando, koordinator, dan pelaksana dalam Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan hasil SK Wali Kota dalam Status Keadaan Darurat Bencana yang berlangsung selama 14 hari sehingga dilakukan pengarahan dan koordinasi oleh BPBD Kota Tangerang dan tim. Pengaktifan Pos Lapangan sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dari pihak kelurahan dan kecamatan. Penaganan diawali dengan pelaksanaan assessment atau pengkajian cepat untuk pendataan situasi dan kondisi bencana, pelaporan, dan evakuasi masyarakat serta koordinasi dengan Tim Gabungan Penanggulangan Bencana meliputi Dinas Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, selimut, kasur, dan pakaian serta dapur umum yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Bantuan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas meliputi bantuan obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan pengungsi serta bantuan PMI sebagai relawan, Dinas PUPR untuk perbaikan tanggul menggunakan kisdam, dan Satpol PP dalam perbantuan petugas evakuasi, peralatan, dan pengamanan ketertiban. Proses evakuasi melalui koordinasi yang dilakukan melalui Whatsapp grup, HT Ring, dan radio frekuensi untuk upaya komunikasi agar tidak terputus. Proses evakuasi dan penyelamatan dilakukan kepada masyarakat yang ingin dievakuasi ke tempat yang lebih aman sebagai lokasi pengungsian di gor, masjid, dan

posyandu dengan perlindungan prioritas kepada lansia dan anak-anak.

Gambar 3 Proses Evakuasi Masyarakat



Sumber : BPBD Kota Tangerang

3. Pasca Bencana

a. Rehabilitas

BPBD Kota Tangerang dan tim melakukan bantuan pembersihan wilayah yang terdampak dari lumpur, normalisasi sungai dari sampah dan sedimen yang menghambat aliran sungai serta pelaksanaan *trauma healing* sebagai upaya komunikasi dan motivasi untuk mengurangi stress pasca bencana banjir akan tetapi perlu peningkatan pengetahuan psikososial oleh BPBD Kota Tangerang untuk pelaksanaan *trauma healing* serta bantuan perbaikan rumah masyarakat yang belum dapat terlaksana karena terhalang dengan persetujuan syarat klasifikasi kerusakan untuk bantuan yang diberikan sehingga belum terdapat anggaran khusus yang tersedia.

b. Rekonstruksi

BPBD Kota Tangerang melaksanakan kajian dan pendataan dampak kerusakan yang timbul pasca bencana banjir untuk memberikan rekomendasi teknis oleh Dinas PUPR untuk perbaikan maupun pembangunan kembali seperti pembangunan tanggul beton

untuk mencegah bencana banjir kembali terjadi. Namun terdapat hambatan pada anggaran untuk pembebasan lahan dalam pembangunan tanggul yang membutuhkan anggaran besar dalam pembebasan tanahnya sehingga dilaksanakan sesuai prioritas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan berkaitan dengan Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Tangerang masih belum terlaksana optimal karena ditemukan beberapa hambatan pada tahapan pra bencana (kesiagaan, peringatan dini, mitigasi) yang masih belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat kekurangan pada aspek peringatan dini yang belum menjadi prioritas, mitigasi belum mampu mengurangi risiko bencana baik secara fisik serta hambatan pada kesadaran masyarakat dalam budaya membuang sampah di sungai, simulasi bencana banjir yang belum pernah dilakukan di Kota Tangerang, kurangnya pengawasan pada bangunan liar yang terdapat pada bantaran sungai sehingga menghambat upaya normalisasi sungai. Saat bencana (tanggap darurat) yang sudah terlaksana sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimiliki melaksanakan serangkaian upaya Penanganan Kedaruratan Bencana dimulai dengan pengkajian cepat mengenai situasi dan kondisi masyarakat dan lokasi bencana banjir, penyelamatan evakuasi korban jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi dan pengurusan pengungsi. Namun masih terdapat hambatan pada keterbatasan sarana dan prasarana berupa peralatan seperti perahu dan tenda akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Pasca bencana (rehabilitas, rekonstruksi) yang masih belum terlaksana sepenuhnya karena hambatan anggaran dan syarat klasifikasi kerusakan pada bantuan rehabilitasi perbaikan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harijoko et al. (2020). *Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press
- Khambali, I. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta :Penerbit ANDI
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta : Gava Media
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Fadillah, N., Setiawati, B., & Arfah, S. R. (2022). *Manajemen Bencana Penanggulangan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 722-732.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana